



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TRIWULAN I T.A. 2018**

I. DASAR:

- a. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/629/XII/2017/Tipidkor tanggal 29 Desember 2017 tentang pelaksanaan tim penanganan pengaduan masyarakat;
- e. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) TW I T.A 2018 Dittipidkor Bareskrim Polri.

II. PELAKSANAAN

Penanganan DUMAS pada Triwulan I ini belum memberikan pelayanan yang lebih baik daripada sebelumnya dalam artian belum ada peningkatan, dimana dalam pelayannya sebagian besar dilimpahkan ke wilayah dengan mempertimbangkan beberapa aspek, dan sampai saat ini belum adanya laporan/aduan masyarakat melalui online/website maka dapat disimpulkan respon masyarakat masih sangat kurang terkait hal ini.

Pelaksanaan sosialisasi terhadap Jukrah/petunjuk pada wilayah terkait tindak lanjut penanganan/pelayanan Dumas (limpahan) dari Dittipidkor Bareskrim Polri akan dilaksanakan pada saat Rapat kerja teknis (RAKERNIS TA 2018)


kedepan guna keseragaman jenis pelaporan dan penanganannya, serta dari pihak Direktorat dapat menampung permasalahan-permasalahan kendala yang dihadapi oleh wilayah dalam menangani DUMAS.

III. KESIMPULAN

Perlu dilakukan evaluasi dan dikaji kembali terhadap kurangnya respon masyarakat dalam memberikan laporan melalui online/website. Apakah hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi sehingga ketidaktahuan masyarakat atau kurang nyamannya/kekhawatiran masyarakat bila melakukan pelaporan dengan sistem online tersebut.

IV. PENUTUP

Demikian tindak lanjut monitoring dan Evaluasi Dumas pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri pada triwulan I ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam memberikan pelayanan Dumas dan dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 16 April 2018
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI